

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar di sektor pariwisata, salah satunya adalah Kota Lama yang merupakan ikon sejarah dan budaya kota ini. Tetapi, Kota Lama yang sebenarnya sangat strategis mengalami pergeseran fungsi, sehingga mengakibatkan kematian Kawasan. Revitalisasi Kota Lama Semarang telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Kawasan bersejarah ini, dengan arsitektur kolonial yang khas dan nilai budaya yang tinggi, menyimpan potensi yang sangat besar untuk menjadi destinasi wisata unggulan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kota Lama merupakan kawasan yang memiliki banyak bangunan bersejarah dengan arsitektur kolonial yang dibangun pada masa lalu (Kojongian, dkk., 2017). Bangunan tersebut, yang merupakan hasil karya dari bangsa asing, meliputi kraton, ruko, dan benteng (Murtomo, 2008). Karena nilai sejarah yang dimilikinya, kawasan ini ditetapkan sebagai cagar budaya (Adi, dkk., 2012). Penetapan ini didasarkan pada konteks lokal serta karakteristik, keunikan, dan potensi kawasan yang mencerminkan hubungan lintas waktu (Ferrari & Morazzoni, 2012). Di Indonesia, suatu kawasan disebut cagar budaya apabila terdapat bangunan peninggalan yang berusia minimal 50 tahun dan memiliki nilai sejarah, pengetahuan, serta kebudayaan (Hartati, 2020). Kota Lama sendiri erat kaitannya dengan peninggalan zaman kolonial Belanda berupa bangunan bergaya kolonial

yang bernilai sejarah, sehingga perlu dilestarikan. Salah satu contoh Kota Lama di Indonesia adalah Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS), yang dijuluki "*The Little Netherland*" karena keberadaannya sejak masa kolonial Belanda (Adi, dkk., 2012; Murtomo, 2008; Probowati, 2015). Menurut Murtomo (2008), kawasan ini pernah menjadi pusat Kota Semarang pada masa lampau, tetapi seiring perkembangan zaman, Kawasan Kota Lama Semarang cenderung terbengkalai dan ditinggalkan (Trancik, 1986). Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai masalah, baik fisik maupun non-fisik. Berdasarkan dokumen awal 2019 dari BPSKL (Badan Pengelola Situs Kota Lama), masalah fisik meliputi bangunan kuno yang tidak terawat dan tidak berfungsi, kurangnya infrastruktur seperti lampu penerangan jalan, serta sistem drainase yang buruk sehingga sering terjadi rob. Adapun masalah non-fisik mencakup penggunaan kawasan untuk aktivitas ilegal seperti perjudian, sabung ayam, prostitusi, dan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) ilegal.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah kota bekerja sama dengan pemerintah pusat mengupayakan program revitalisasi. Revitalisasi menjadi langkah penting untuk melestarikan KKLS (Adi, dkk., 2012; Biliński, 2017; Pramana, dkk., 2016; Probowati, 2015). Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi kawasan dengan tetap melindungi nilai sejarahnya (Charther, 1981), sekaligus menjadikannya lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat masa kini sehingga kawasan dapat hidup kembali (Tkalac & Vukonic, 1984). Revitalisasi dilakukan dengan menjaga nilai sejarah dan budaya kawasan, sambil mengadaptasikannya dengan kebutuhan masyarakat modern (Biliński, 2017;

Probowati, 2015). Tujuannya adalah melestarikan nilai-nilai bersejarah sekaligus mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata di kawasan tersebut (Adi, dkk., 2012).

Kawasan Kota Lama Semarang dianggap sebagai kawasan yang ideal untuk revitalisasi karena termasuk kawasan mati dan memiliki peninggalan budaya berupa bangunan kolonial bersejarah (Probowati, 2015; Biliński, 2017). Revitalisasi tidak hanya mencakup perbaikan fisik, tetapi juga berdampak pada perubahan sosial dan ekonomi masyarakat (Pramana, dkk., 2016). Program revitalisasi yang dilakukan melalui dua tahap yaitu pada tahun 2017 dan 2020 mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan mengatasi masalah di KKLS, mengaktifkan kembali bangunan-bangunan kuno yang mangkrak, serta menciptakan ruang bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah kawasan (Safitri & Wijayati, 2024). Karena seiring berjalannya waktu, Kawasan tersebut mengalami degradasi fisik dan sosial yang cukup parah, bangunan-bangunan bersejarah terancam rusak, fasilitas umum terbatas, dan minat wisatawan pun cenderung rendah.

Revitalisasi Kawasan Kota Lama ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata berbasis sejarah (Adi, dkk., 2012; Ferrari & Morazzoni, 2012; Hakim, 2018) guna meningkatkan daya tarik kawasan (Hu & Jin, 2015) secara berkelanjutan (Setiawan, 2015). Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan nilai sejarah yang khas dan unik, yang tidak dimiliki oleh wilayah lain (Mackellar, 2006), seperti yang diterapkan pada Kawasan Kota Lama Semarang. Pariwisata sendiri didefinisikan sebagai aktivitas bepergian ke suatu tempat di luar lingkungan

aktivitas sehari-hari dalam waktu singkat (Pendit, 1999) dengan tujuan memenuhi kebutuhan psikologis dan fisik (Arianti, 2017). Wisata di kawasan bersejarah seperti ini berpotensi meningkatkan pendapatan daerah (Saleh, 2004) dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat (Arianti, 2017).

Pemerintah Kota Semarang menyatakan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Tua Semarang bahwa revitalisasi merupakan penerapan peraturan daerah serta upaya untuk menghidupkan kembali fungsi Kawasan Kota Tua Semarang. Pembangunan kembali Kawasan Kota Tua Semarang telah berdampak pada jaringan jalan, termasuk peningkatan kualitas jalan, perluasan trotoar, dan penambahan fasilitas jalan. Kawasan Kota Tua Semarang sedang menjalani renovasi besar-besaran pada jaringan jalannya, terutama di Jl. Letjen Suprpto, Jl. Kepodang, Jl. Sendowo, dan Jl. Branjangan. Trotoar pejalan kaki dan furnitur jalan telah dibeli dan diperluas di berbagai bagian jalan di Kawasan Kota Tua Semarang, termasuk Jl. Letjen Suprpto, Jl. Kepodang, dan Jl. Branjangan. Untuk melindungi nilai-nilai warisan sejarah dan budaya, bangunan-bangunan tua di Kawasan Kota Tua Semarang telah direnovasi secara fisik dan struktural sambil tetap mempertahankan bentuk aslinya. Pembinaan Kawasan Kota Tua Semarang mencakup total 80 bangunan. Studi ini hanya menggunakan sekitar 25 bangunan untuk penelitian, dengan alasan pemilihan sebagai berikut: (1) mereka terletak di jalur lalu lintas utama, terutama Jl. Letjen Suprpto dan Jl. Kepodang, (2) mereka masih digunakan hingga saat ini, dan (3) mereka merupakan bangunan warisan budaya atau objek wisata.. Dampak

revitalisasi terhadap aspek karakteristik bangunan terbagi menjadi 3 pembahasan yaitu fungsi bangunan, fasad bangunan, dan harga lahan bangunan (Firdausyah & Dewi, 2021).

Menurut Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah dalam jumpa pers OPD tahun 2020, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Kota Lama Semarang terus meningkat. Wisatawan yang datang terbagi menjadi wisatawan mancanegara dan domestik (Hakim, 2018; Inskip, 1988). Pada tahun 2018, terdapat sekitar 30 ribu wisatawan mancanegara, yang meningkat menjadi 61 ribu pada tahun 2019, sementara wisatawan domestik mencapai 2,6 juta. Tingginya tingkat kepuasan wisatawan terhadap kawasan ini mendorong kunjungan ulang dan juga rekomendasi kepada orang lain untuk berkunjung (Fornell, 1992 dalam Diniyah, dkk., 2018). Berdasarkan informasi dari Kepala Disporapar, KKLS bahkan termasuk dalam tiga besar destinasi wisata utama di Jawa Tengah setelah Candi Borobudur dan Candi Prambanan.

Banyak wisatawan mengunjungi Kawasan Kota Lama Semarang untuk berswafoto, berjalan santai, atau menikmati objek wisata di dalamnya. Perubahan kondisi kawasan dan peningkatan jumlah wisatawan menunjukkan bahwa revitalisasi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan daya tarik kawasan di Kota Semarang. Seperti yang diketahui bahwa revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang ini juga berdampak pada jumlah pengunjung wisata di Kota Semarang terutama setelah revitalisasi Kota Lama pada tahun 2017, Dan menurun pada 2020 karna adanya Virus Covid-19.

Tabel 1. 1 Pengunjung wisata di Kota Lama Semarang tahun 2008-2023

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Total
2008	4.500	640.000	644.500
2009	5.200	710.000	715.200
2010	9.400	820.000	829.400
2011	12.600	960.000	972.600
2012	17.200	1.150.000	1.167.200
2013	20.300	1.400.000	1.420.300
2014	24.500	1.620.000	1.644.500
2015	28.700	1.860.000	1.888.700
2016	31.900	2.050.000	2.081.900
2017	26.500	2.200.000	2.226.500
2018	30.000	2.400.000	2.430.000
2019	61.000	2.600.000	2.661.000
2020	5.100	980.000	985.100
2021	47	1.100.000	1.100.047
2022	3.800	1.950.000	1.953.800
2023	11.200	2.320.000	2.331.200

(**Sumber:** Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintahan Kota Semarang, Tahun 2024)

Meskipun revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang telah berhasil meningkatkan kualitas fisik kawasan dan menarik minat kunjungan wisata, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan. Beberapa di antaranya adalah belum optimalnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap konsep pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata heritage yang berkelanjutan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan, serta belum meratanya dampak ekonomi yang dirasakan oleh pelaku

usaha lokal. Selain itu, peningkatan aktivitas wisata juga menimbulkan tantangan baru seperti pengelolaan sampah, kepadatan aktivitas, serta tekanan terhadap lingkungan kawasan.

Di sisi lain, dalam praktiknya masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pemanfaatan kawasan dengan prinsip pelestarian cagar budaya, seperti perubahan fungsi bangunan yang tidak sepenuhnya memperhatikan nilai historis serta munculnya aktivitas ekonomi yang kurang terkendali. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan ketimpangan antara pelaku usaha besar dan usaha kecil, sehingga tidak semua pihak merasakan manfaat revitalisasi secara merata. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan kawasan masih terbatas, sehingga muncul kecenderungan masyarakat hanya sebagai objek, bukan sebagai subjek dalam pengembangan kawasan wisata. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama dalam mengintegrasikan aspek pelestarian, pengembangan ekonomi, serta partisipasi masyarakat dalam kerangka pariwisata berkelanjutan.

Revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang tidak terlepas dari kerangka regulasi yang mengatur pengelolaan kawasan, baik pada tingkat daerah maupun nasional. Salah satu regulasi yang menjadi dasar adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Semarang yang mengarahkan pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal dan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan kawasan Kota Lama sebagai kawasan cagar budaya juga diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, khususnya pada Pasal 80 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa pemanfaatan cagar budaya dapat dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, seperti kegiatan pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, sosial, budaya, dan pariwisata, dengan tetap menjaga kelestarian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Namun, dalam pemanfaatannya terdapat batasan yang harus dipatuhi, seperti larangan merusak, mengubah bentuk asli, atau menghilangkan nilai historis bangunan cagar budaya. Dengan demikian, revitalisasi kawasan Kota Lama pada dasarnya memperbolehkan pemanfaatan bangunan untuk kegiatan ekonomi dan pariwisata, tetapi tetap harus mempertahankan keaslian arsitektur dan karakter kawasan. Dalam praktiknya, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan regulasi dengan kondisi di lapangan, sehingga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia mewajibkan setiap daerah untuk mandiri, karena daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan dan aset budaya mereka sendiri. Kota Semarang, misalnya, masih perlu dipromosikan sebagai destinasi wisata, karena simbol-simbol budaya baru perlu ditambahkan ke simbol-simbol yang sudah ada. Industri pariwisata sangat penting untuk memperkuat ekonomi lokal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, sementara pemerintah pusat menangani isu-isu strategis. Penguatan identitas lokal dilakukan oleh suatu daerah dengan adanya otonomi serta turut

mewarnai perencanaan pembangunan daerah karena belakangan ini identitas lokal menjadi salah satu kekuatan “*unike selling*” untuk daerah (Salamah, 2014:2).

Salah satu keunggulan wilayah dalam mengelola otonominya adalah keberadaannya sendiri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan potensi pariwisata wilayahnya dengan cara-cara baru dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan aliran pendapatan lokal untuk pengembangan wilayah. Kesuksesan dalam mempromosikan pariwisata sebagai sumber pendapatan lokal alternatif memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan.

Revitalisasi kawasan Kota Tua, yang bertujuan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan, memerlukan partisipasi penuh masyarakat dalam semua tahap pengembangan, mulai dari perencanaan hingga implementasi, untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dengan baik pengawasan dan pemeliharaan hasil pengembangan pariwisata. Masyarakat lokal memainkan peran penting dalam pertumbuhan sektor pariwisata. Sesungguhnya, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata menyatakan bahwa pariwisata didasarkan pada konsep-konsep partisipasi, manfaat, kekeluargaan, keadilan dan kesetaraan, keseimbangan, kemandirian, keberlanjutan, demokrasi, kesetaraan, dan persatuan. Bahkan dalam ketentuan Pasal 5, jelas bahwa salah satu tujuan yang mengarahkan pelaksanaan pariwisata adalah memberdayakan masyarakat lokal. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, khususnya dalam ketentuan Pasal 5, jelas bahwa istilah “masyarakat lokal” merujuk pada masyarakat yang tinggal di kawasan destinasi pariwisata dan diprioritaskan

untuk mendapatkan manfaat dari pelaksanaan kegiatan pariwisata di lokasi tersebut. Berdasarkan alasan yang telah dijelaskan di atas, jelas bahwa memberdayakan dan melibatkan secara aktif masyarakat lokal merupakan hal yang kritis bagi pertumbuhan pariwisata.

Penelitian ini berprinsip pada Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan yang dimaksud ini merupakan pendekatan dalam industri pariwisata yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan wisatawan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan Masyarakat lokal. Konsep ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan budaya secara bertanggung jawab, sehingga dampak negatif dari aktivitas pariwisata dapat diminimalkan. Dalam praktiknya, pariwisata berkelanjutan mencakup upaya untuk melestarikan ekosistem, mengurangi polusi, serta menghormati tradisi dan warisan budaya masyarakat setempat (Harsono., dkk, 2025). Namun permasalahan yang muncul ialah kerap kali pengembangan pariwisata tidak diarahkan pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa fasilitas penunjang pariwisata yang dibangun tidak sesuai dengan peruntukannya. Padahal saat ini, Pemerintah sedang berupaya untuk mendorong pariwisata berkelanjutan.

Menurut Sharpley (2006), tujuan dasar Pariwisata Berkelanjutan adalah tercapainya keseimbangan antara lingkungan pariwisata, kebutuhan lokal masyarakat dan kebutuhan wisatawan. Dengan kata lain, tujuan pencapaian, sustainable development adalah :

1. Tujuan Pembangunan

Berfokus pada pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan akar rumput untuk pembangunan yang berfokus pada kepuasan kebutuhan dasar masyarakat.

2. Tujuan lingkungan/berkelanjutan

Melestarikan dan melindungi lingkungan, terutama melestarikan sumber daya tak terbarukan.

Menurut (Sulistyadi dkk., 2017), prinsip pariwisata berkelanjutan merujuk pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan oleh Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) sebagai pariwisata yang sepenuhnya memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan di masa depan, serta memenuhi kebutuhan para pengunjung, industri pariwisata, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah. Tujuan dari *sustainable tourism* adalah untuk mengurangi kemiskinan, dengan menghormati keotentikan sosial-budaya, dan penggunaan sumberdaya lingkungan secara bertanggung-jawab, dan tidak hanya mendorong melainkan juga memfasilitasi serta melakukan pemberdayaan terhadap komunitas agar mereka mampu berperan serta dalam proses produksi serta mendapat berbagai manfaat langsung dari kegiatan pariwisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012). Selain itu, pariwisata berkelanjutan juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan memberikan manfaat langsung kepada komunitas yang terlibat dalam industri pariwisata. Setelah adanya peraturan menteri tersebut, Revitalisasi kawasan tidak hanya dilakukan melalui perbaikan fisik bangunan atau penataan ruang semata. Pemerintah Kota Semarang juga

melakukan langkah lain yang sifatnya lebih non-fisik, yaitu dengan menghidupkan kembali fungsi beberapa gedung tua yang sebelumnya tidak lagi dimanfaatkan secara optimal. Salah satu contohnya adalah bangunan bekas kantor PT. Telkom yang kemudian dialihfungsikan menjadi Galeri UMKM. Selain itu, terdapat pula gedung bekas PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia yang kini dimanfaatkan sebagai ruang kreatif bernama Galeri Industri Kreatif. Kedua tempat ini pada dasarnya memiliki tujuan yang serupa, yaitu mendukung pengembangan serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keberadaan galeri tersebut tidak sekadar menjadi ruang pameran biasa. Di dalamnya, berbagai produk UMKM dari Kota Semarang maupun dari wilayah lain di Jawa Tengah dipamerkan sekaligus dipasarkan kepada masyarakat. Dengan cara ini, pemerintah berupaya membuka akses yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka. Melalui pemanfaatan ruang-ruang lama menjadi galeri ekonomi kreatif seperti ini, pemerintah berharap potensi UMKM lokal dapat lebih terlihat oleh publik. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi strategi untuk memperkuat eksistensi produk-produk daerah agar semakin dikenal, baik oleh masyarakat Kota Semarang sendiri maupun oleh pengunjung dari luar daerah.. Dengan demikian, pariwisata berkelanjutan tidak hanya memberikan pengalaman yang positif bagi wisatawan tetapi juga memastikan bahwa sumber daya yang ada tetap ada untuk generasi emas mendatang. Dengan kata lain, pariwisata berkelanjutan berusaha menyeimbangkan tiga pilar utama: lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dampaknya dari beberapa kebijakan tersebut terhadap Pemerintah Kota Semarang adalah dengan adanya Pengakuan Kota Lama Semarang sebagai Warisan Dunia UNESCO pada pertengahan tahun 2021 yang membawa implikasi signifikan bagi Pemerintah Kota Semarang. Status prestisius ini tidak hanya meningkatkan citra kota di kancah internasional, menarik perhatian wisatawan dalam dan luar negeri, tetapi juga memicu tanggung jawab yang lebih besar dalam pelestarian dan pengelolaan kawasan tersebut. Pemerintah Kota Semarang semakin terpacu untuk memperkuat upaya revitalisasi, baik fisik maupun non-fisik, dengan berpedoman pada standar dan rekomendasi UNESCO. Hal ini termasuk peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata yang berkelanjutan di sekitar Kota Lama, penataan ruang publik yang lebih memperhatikan aspek konservasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar turut berperan aktif dalam menjaga warisan budaya ini. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga berpotensi mendapatkan dukungan dan kolaborasi yang lebih luas dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, organisasi internasional, maupun sektor swasta, dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang berlandaskan pada nilai-nilai universal Kota Lama Semarang.

Fakta empirik menunjukkan bahwa kawasan Kota Lama Semarang memiliki posisi yang sangat strategis, terutama dari segi fungsi ekonomi dan pariwisata. Sejak masa kolonial Belanda, kawasan ini telah menjadi pusat perdagangan di Kota Semarang. Hingga saat ini, fungsi ekonomi tersebut masih terlihat melalui berbagai aktivitas usaha yang dijalankan oleh pihak swasta maupun pemerintah, seperti restoran, kafe, pusat oleh-oleh, dan minimarket. Di sisi lain,

fungsi pariwisata di Kota Lama juga semakin berkembang setelah dilakukan berbagai upaya revitalisasi. Bangunan-bangunan bersejarah dan fasilitas umum yang telah diperbaiki membuat kawasan ini lebih tertata dan menarik untuk dikunjungi. Selain itu, aktivitas dari berbagai komunitas turut berperan dalam menghidupkan suasana Kota Lama, terutama pada malam hari. Kondisi tersebut membuat pengunjung dapat menikmati suasana khas kawasan yang sering dijuluki sebagai *Little Netherlands*, dengan keunikan arsitektur kolonial dan aktivitas yang berkembang di dalamnya. Maka dari itu, penelitian ini hadir untuk menjawab bagaimana upaya revitalisasi Kota Lama Semarang dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Berdasarkan data serta uraian di atas, Penelitian ini penting karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam merevitalisasi objek wisata bersejarah sebagai upaya mendukung pariwisata berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang dalam mendukung pariwisata berkelanjutan?
2. Sejauh mana kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang telah berhasil mewujudkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang dalam mendukung pariwisata berkelanjutan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang telah berhasil mewujudkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah mempelajari dan menganalisa masalah penelitian yang ada, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat terutama dalam memperkaya konsep-konsep seperti partisipasi masyarakat, good governance, dan pembangunan berkelanjutan dalam konteks implementasi kebijakan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi faktor- faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan revitalisasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga dalam perencanaan pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, tidak hanya di Kota Lama Semarang, tetapi juga di daerah lain dengan karakteristik serupa.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan fasilitas publik serta dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui berbagai aktivitas ekonomi yang terkait dengan pariwisata atau menciptakan lapangan kerja baru di sektor pariwisata maupun UMKM.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya revitalisasi kawasan bersejarah dan pariwisata berkelanjutan, serta dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu selain dijadikan informasi tambahan terkait penelitian, juga membantu penulis untuk memposisikan hasil penelitian dengan terori. Penelitian sebelumnya juga dapat menjadi acuan bag penulis untuk menambah prespektif lainya terkait penelitian sejenis. Maka dari itu penulis memberikan beberapa literatur terkait penelitian yang akan dilakukan. Terdapat sejumlah penelitian yang juga dapat dijadikan rujukan dan materi penelitian penulis antara lain:

Jurnal yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Tentang Revitalisasi Kota Lama Semarang Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Sektor Pariwisata." Yang ditulis oleh Mochammad Akbar Yanuarsyad. Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Akbar Yanuarsyad lebih lanjut

meneliti implementasi kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam revitalisasi Kota Lama serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata, memberikan kontribusi penting dalam literatur mengenai manajemen kawasan bersejarah dan pengembangan ekonomi daerah. Dalam konteks Kota Semarang, berbagai studi mengungkapkan bahwa pengelolaan kawasan Kota Lama secara optimal, baik melalui peningkatan infrastruktur, promosi wisata, maupun partisipasi aktif masyarakat, menjadi kunci keberhasilan dalam memaksimalkan potensi wisata serta meningkatkan PAD.

Jurnal yang berjudul “Revitalisasi Desain Interior Gedung Kesenian Sobokartti Di Semarang.” Yang ditulis oleh Hayyumi Noor. Menunjukkan bahwa revitalisasi gedung kesenian tidak hanya fokus pada peningkatan fungsi dan kenyamanan, tetapi juga pada aspek simbolis yang mencerminkan identitas budaya setempat. Pendekatan yang diterapkan mencakup adaptasi elemen- elemen interior tradisional dengan desain modern, pemilihan material yang sesuai untuk meningkatkan daya tahan, serta optimalisasi tata ruang agar dapat mendukung beragam kegiatan kesenian. Studi mengenai revitalisasi Gedung Kesenian Sobokartti ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya pelestarian gedung kesenian lainnya, serta mendorong apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya dan sejarah kota Semarang.

Jurnal yang berjudul “Revitalisasi Kawasan Kota Lama sebagai Upaya City Branding di Kota Semarang.” Yang ditulis oleh Natalia Citra Bintang Timur. Revitalisasi ini terbukti tidak hanya melestarikan nilai sejarah dan warisan budaya,

tetapi juga memperbaiki kualitas lingkungan fisik, memperkuat identitas kota, serta meningkatkan perekonomian lokal melalui pengembangan pariwisata.

Jurnal yang berjudul “Pengembangan Wisata Kampung Pelangi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Semarang” Yang ditulis oleh Putri, Cahyaningrum. Peran pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kampung Pelangi pada dasarnya sudah berjalan cukup baik. Program pengembangan kawasan wisata tersebut mampu mendorong keterlibatan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Kehadiran Kampung Pelangi membuat aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih hidup, terutama karena meningkatnya jumlah pengunjung yang datang dan terjadinya perputaran ekonomi di tingkat lokal. Meski demikian, proses pemberdayaan ini belum sepenuhnya optimal. Masih diperlukan pendampingan yang lebih intensif, khususnya melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis), agar potensi yang dimiliki Kampung Pelangi dapat dikembangkan secara lebih maksimal dan mampu terus menarik minat wisatawan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui pengembangan wisata tersebut, sekaligus melihat sejauh mana peran pemerintah dalam mendukungnya. Dalam praktiknya, pengembangan Kampung Pelangi juga menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber dana, keterbatasan sumber daya manusia, serta keterbatasan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk menambah atraksi wisata baru.

Jurnal yang berjudul “Strategi Pengembangan Pariwisata Warisan Budaya Pada Puro Mangukunegaran Solo” Yang ditulis oleh Putra, Yosafat Krisatya

Herdyanto. Penelitian ini menyoroti pentingnya strategi yang berfokus pada pelestarian, inovasi, dan peningkatan kualitas pelayanan wisata di situs-situs bersejarah pada Puro Mangkunegaran di Solo. menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata warisan budaya memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna menciptakan nilai tambah bagi wisatawan dan mempertahankan keaslian budaya. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas juga dinilai efektif untuk melibatkan masyarakat lokal dalam menjaga dan mengelola objek wisata budaya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek penataan fisik kawasan dan pengembangan pariwisata secara umum. Beberapa penelitian juga menyoroti dampak ekonomi dari revitalisasi, namun belum banyak yang mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi tersebut dijalankan oleh para aktor yang terlibat. Selain itu, keterkaitan antara implementasi kebijakan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan, khususnya dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, juga masih belum banyak dianalisis secara komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian dalam memahami bagaimana kebijakan revitalisasi tidak hanya dirumuskan, tetapi juga diimplementasikan di lapangan serta dampaknya terhadap keberlanjutan kawasan.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis implementasi kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan, serta mengaitkannya

dengan konsep pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada perubahan fisik kawasan, tetapi juga menelaah peran aktor, proses implementasi, serta dampak kebijakan terhadap aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam melihat keberhasilan revitalisasi secara lebih komprehensif

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan
1	Mochammad Akbar Yanuarsyad (2020) Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Tentang Revitalisasi Kota Lama Semarang Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Sektor Pariwisata	Kualitatif	Implementasi kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang dan dampaknya terhadap PAD sektor pariwisata	Kebijakan revitalisasi Kota Lama berpotensi meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Namun, keberhasilannya tergantung pada pengelolaan yang optimal, termasuk peningkatan infrastruktur, promosi wisata, dan partisipasi masyarakat.
2.	Hayyumi Noor (2018) Revitalisasi Desain Interior Gedung Kesenian Sobokartti Di Semarang	Metode Kualitatif dan Studi Kasus	Revitalisasi desain interior gedung kesenian dan pengaruhnya terhadap identitas budaya	Revitalisasi gedung kesenian tidak hanya fokus pada fungsi dan kenyamanan, tetapi juga pada aspek simbolis yang mencerminkan identitas budaya setempat.
3.	Natalia Citra Bintang Timur (2020) Revitalisasi Kawasan Kota Lama sebagai upaya <i>city branding</i> di Kota Semarang	Metode Kualitatif	Revitalisasi Kota Lama sebagai upaya <i>city branding</i>	Revitalisasi Kota Lama tidak hanya melestarikan nilai sejarah dan warisan budaya, tetapi juga memperbaiki kualitas lingkungan fisik, memperkuat identitas kota, dan meningkatkan perekonomian lokal.

4	Putri, Cahyaningrum (2019) Pengembangan Wisata Kampung Pelangi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Semarang	Metode Kualitatif	Proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata Kampung Pelangi dan peran pemerintah	Peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat Kampung Pelangi berjalan dengan baik, namun masih perlu adanya pendampingan Pokdarwis.
5	Putra, Yosafat Krisatya Herdyanto (2024) Strategi Pengembangan Pariwisata Warisan Budaya Pada Puro Mangkunegaran Solo	Metode Kualitatif	Strategi pengembangan pariwisata warisan budaya pada Puro Mangkunegaran	Keberhasilan pengembangan pariwisata warisan budaya memerlukan kolaborasi pemerintah, masyarakat, sektor swasta. Pendekatan berbasis komunitas juga dinilai efektif.

(Sumber : Diolah Peneliti, 2024)

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Implementasi Kebijakan

Dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980), sangat penting dalam kerangka teori penelitian ini. Edwards menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi yang efektif dalam menyampaikan tujuan dan mekanisme revitalisasi, termasuk melibatkan masyarakat dan stakeholders terkait; sumber daya yang memadai baik finansial untuk pembiayaan proyek, maupun non-finansial seperti tenaga ahli dan teknologi; disposisi positif dari para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis, yang tercermin dalam dukungan dan partisipasi aktif mereka; serta struktur birokrasi yang efisien dalam mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat, menghindari tumpang tindih tugas dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Implementasi sering dianggap sebagai tahap paling krusial dalam rangkaian proses kebijakan publik. Pada tahap inilah sebuah kebijakan tidak lagi berhenti pada rumusan atau dokumen formal, tetapi mulai diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Karena itu, implementasi tidak hanya berkaitan dengan mekanisme atau prosedur pelaksanaan kebijakan, melainkan juga dengan hasil yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Chief J. O. Odoji yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan justru lebih penting dibandingkan proses perumusannya. Menurutnya, kebijakan yang tidak segera diimplementasikan hanya

akan menjadi gagasan yang bersifat utopis. Pernyataan tersebut juga dikutip oleh Solichin Abdul Wahab dalam karyanya pada tahun 2008.

Dengan kata lain, kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan apabila lembaga atau agen pelaksana di tingkat bawah tidak menjalankannya secara efektif. Dalam praktiknya, proses implementasi kebijakan sering dipandang sebagai proses yang kompleks dan sarat kepentingan. Hal ini terjadi karena pada tahap implementasi biasanya terdapat berbagai aktor yang terlibat, masing-masing dengan kepentingan dan pengaruh yang berbeda.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hadari Nawawi dalam tulisannya tahun 2009, selain pandangan Odoji, terdapat pula berbagai penafsiran mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli lainnya. Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi bukan sekadar tahap teknis, tetapi juga merupakan proses yang dinamis dan sering kali dipengaruhi oleh faktor politik, kelembagaan, maupun sumber daya yang tersedia.

1. Van Meter dan Van Horn (1975) memandang implementasi kebijakan sebagai kegiatan yang dilakukan individu, pejabat, maupun kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Mazmanian dan Paul Sabatier, mengemukakan bahwa implementasi kebijakan berkelindan dalam pelaksanaan keputusan kebijakan. Kebijakan tersebut dikemas menjadi berbagai hal seperti keputusan penting eksekutif atau Badan Penelitian, perintah, maupun undang-undang.

3. Jones, berpendapat jika suatu individu atau kelompok memiliki kecakapan menciptakan suatu relasi sebagai rangkaian hubungan kausalitas yang mengoneksikan tindakan dengan tujuan.
4. Grindle dalam Winarno (2008:146) berpandangan bahwa dalam proses pengimplementasian kebijakan, akan menciptakan rantai (linkage) yang memudahkan perealisasi tujuan kegiatan.

Dalam konteks revitalisasi Kota Lama, faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah dalam proses revitalisasi berjalan efektif, apakah telah diterjemahkan dengan baik dari perencanaan ke tindakan nyata, apakah sumber daya yang tersedia mencukupi, dan bagaimana sikap para pelaksana kebijakan memengaruhi hasil implementasi. Kerangka teori ini juga diperkuat dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan pentingnya hubungan antara kebijakan dan implementasinya, dimana keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh karakteristik kebijakan, kapasitas implementator, dan kondisi eksternal.

Mengenai implementasi kebijakan revitalisasi Kota Lama, maka dilakukan analisis yang lebih komprehensif. Selain mengacu pada kerangka teori yang telah disebutkan, perlu pula dikaji aspek legalitas yang mendasari kebijakan tersebut. Undang-undang dan peraturan walikota yang terkait dengan revitalisasi kawasan cagar budaya seperti Kota Lama memiliki peran penting dalam memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan proyek. Peristiwa tentang penyelenggaraan pariwisata yang berkualitas di Kota Semarang, misalnya, dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan revitalisasi Kota Lama

telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, melalui teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana pemerintah Kota Semarang menjalankan kebijakan revitalisasi Kota Lama dan dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi yang merupakan 3 pilar Pariwisata Berkelanjutan.

1.6.2 Pariwisata Berkelanjutan

Dalam pengembangan pariwisata, terdapat beberapa komponen dasar yang perlu diperhatikan agar suatu kawasan wisata dapat berkembang secara optimal. Chris Cooper dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa terdapat empat komponen utama dalam pengembangan pariwisata, yaitu *attractions*, *accessibilities*, *amenities*, dan *ancillary services*. Kerangka ini kemudian juga dijelaskan kembali oleh Astuti dan Noor (2016).

Komponen pertama adalah *attractions* atau atraksi wisata. Atraksi merupakan daya tarik utama yang membuat wisatawan tertarik untuk datang ke suatu tempat. Bentuknya bisa beragam, mulai dari keindahan alam, warisan sejarah, hingga kebudayaan lokal yang khas. Tanpa adanya daya tarik yang kuat, sebuah kawasan akan sulit berkembang sebagai destinasi wisata.

Komponen kedua adalah *accessibilities* atau aksesibilitas. Hal ini berkaitan dengan kemudahan wisatawan untuk mencapai kawasan wisata tersebut. Aksesibilitas dapat berupa ketersediaan jalur transportasi seperti pesawat, kereta, bus, atau kapal yang menghubungkan daerah asal wisatawan dengan kawasan

wisata. Selain itu, di dalam kawasan wisata juga perlu tersedia moda transportasi yang memudahkan pengunjung menjangkau berbagai objek wisata yang ada.

Selanjutnya adalah *amenities* atau fasilitas pendukung. Komponen ini mencakup berbagai sarana yang dibutuhkan wisatawan selama berada di kawasan wisata, seperti penginapan (hotel, homestay, atau hostel), rumah makan, fasilitas kesehatan, tempat penjualan souvenir, hingga infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan pengelolaan sampah. Ketersediaan fasilitas yang memadai akan sangat memengaruhi kenyamanan wisatawan.

Komponen terakhir adalah *ancillary services*, yaitu layanan pendukung yang biasanya dikelola oleh organisasi atau lembaga kepariwisataan. Contohnya seperti asosiasi perhotelan, asosiasi pemandu wisata, maupun biro perjalanan yang membantu mengorganisasi dan memberikan pelayanan kepada wisatawan.

Keempat komponen tersebut saling berkaitan dalam mendukung pengembangan suatu kawasan wisata. Selain itu, pengembangan pariwisata juga umumnya berdampak pada tiga aspek utama di kawasan tersebut, yaitu kondisi ekonomi masyarakat, kehidupan sosial budaya, serta lingkungan hidup di sekitar destinasi wisata..

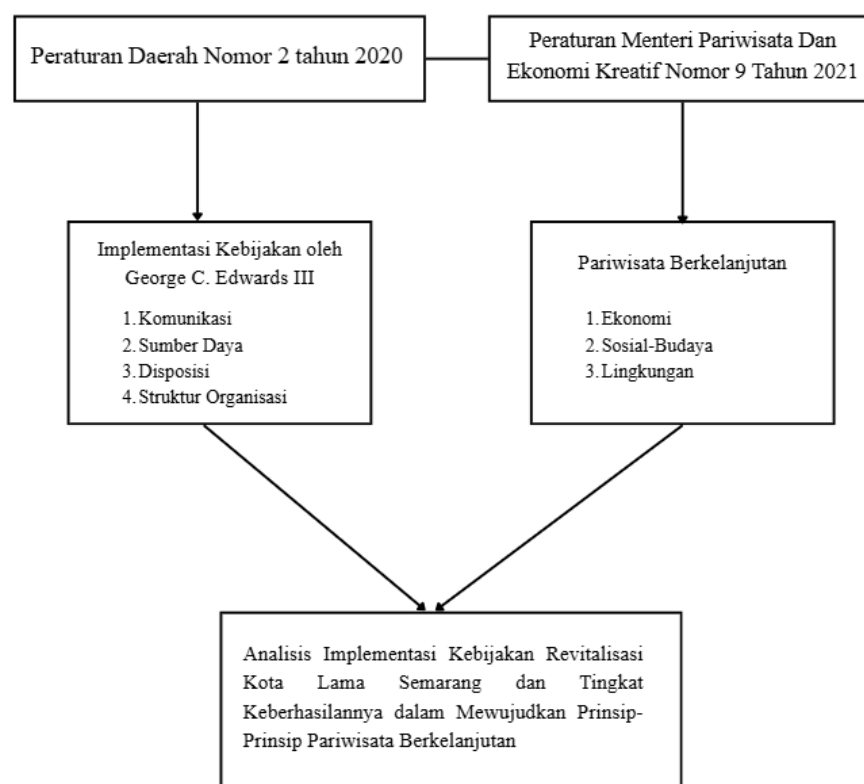
Harapannya pengembangan pariwisata akan berdampak positif tidak hanya terhadap pembangunan ekonomi (peningkatan pendapatan), tetapi juga terhadap kondisi sosial budaya (kesejahteraan masyarakat meningkat dengan kelestarian budaya tetap terjaga) dan kondisi lingkungan (kelestarian lingkungan terjaga). Untuk itulah pengembangan pariwisata yang berkelanjutan diperlukan.

Dalam konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan agar pengembangan wisata tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Menurut Heillbronn, sebagaimana dikutip oleh Tamaratika dan Rozyidie (2017), pembangunan pariwisata berkelanjutan setidaknya harus memenuhi tiga komponen utama, yaitu keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.

1. Pertama, keberlanjutan secara lingkungan. Prinsip ini menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan tidak berlebihan. Pengelolaan destinasi wisata perlu memperhatikan pembatasan pemanfaatan sumber daya, menjaga proses ekologi yang ada, serta melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati agar tetap terjaga dalam jangka panjang.
2. Kedua, keberlanjutan secara ekonomi. Pengembangan pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi lokal, serta upaya mengurangi tingkat kemiskinan di kawasan destinasi wisata.
3. Ketiga, keberlanjutan secara sosial budaya. Dalam aspek ini, pembangunan pariwisata harus tetap menjaga keaslian kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelestarian nilai-nilai budaya dan adat lokal, penerapan aturan yang disepakati bersama oleh masyarakat, serta mendorong terciptanya toleransi dan pemahaman antarbudaya antara masyarakat lokal dan wisatawan.

Maka dari itu untuk mencapai pariwisata berkelanjutan yang lebih optimal, perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih komprehensif.

1.7 Kerangka Berpikir



1.8 Operasionalisasi Konsep

Dari beberapa penjelasan teori diatas mengenai implementasi kebijakan oleh para ahli, penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards III yang mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, yakni : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Revitalisasi Kota Lama sebagai ikon sejarah dan budaya Kota Semarang memiliki dampak besar dalam mendukung Pariwisata Berkelanjutan. Namun, upaya ini tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan. Sebagai kota metropolitan dengan keragaman kultur dan karakteristik masyarakat, Semarang memiliki dinamika sosial yang kompleks. Oleh karena itu, keberhasilan revitalisasi Kota Lama sangat bergantung pada bagaimana pemerintah kota, pengelola, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengelola komunikasi, mengoptimalkan sumber daya, membangun konsensus, serta merancang struktur organisasi yang efektif.

Tabel 1. 3 Operasionalisasi Konsep

Teori Implementasi Kebijakan	
Dimensi	Indikator
Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan tujuan kebijakan tujuan revitalisasi Kota Lama 2. Tingkat pemahaman pelaksana terhadap kebijakan 3. Hambatan Komunikasi dalam implementasi
Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan anggaran revitalisasi 2. Sumber pendanaan program 3. Sumber daya manusia 4. Pengelolaan dan penggunaan anggaran 5. Kecukupan saran dan prasarana
Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap dan komitmen pelaksanaan kebijakan 2. Dukungan pimpinan terhadap kebijakan 3. Tingkat prioritas kebijakan revitalisasi

	4. Kendala sikap / resistensi dalam pelaksanaan
Struktur birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian tugas antar instansi 2. Mekanismen koordinasi antar lembaga 3. Kejelasan aturan atau pedoman kerja 4. Efektivitas sistem kerja dalam pengelolaan kawasan
Pariwisata Berkelanjutan	
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan pendapatan pelaku usaha 2. Peluang usaha yang muncul setelah revitalisasi 3. Stabilitas aktivitas ekonomi kawasan 4. Dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha
Sosial-Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. persepsi pengunjung terhadap kawasan 2. Terjaganya keaslian bangunan cagar budaya 3. Terselenggaranya kegiatan budaya secara rutin 4. Kelestarian sejarah dan budaya 5. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap warisan sejarah Kota Lama
Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. kondisi kebersihan kawasan, 2. Ketersediaan fasilitas kebersihan dan pengelolaan sampah 3. Upaya mitigasi dampak pariwisata terhadap lingkungan

(Sumber : Diolah Peneliti, 2024)

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi ini berfokus pada kasus revitalisasi Kota Lama dalam mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Kota Semarang. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam proses, dampak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan revitalisasi Kota Lama Semarang dalam Mendukung Pariwisata Bekelanjutan. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat diidentifikasi strategi-strategi yang efektif dan tantangan yang dihadapi dalam upaya revitalisasi tersebut.

1.9.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang, dengan Kota Lama sebagai lokasi utama penelitian. Subjek penelitian yang akan dilibatkan yaitu Pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam proses revitalisasi Kota Lama, seperti BPSKL (Badan Pengelola Kawasan Kota Lama), pelaku usaha/UMKM pariwisata seperti pedagang kaki lima atau galeri seni, pengunjung Kota Lama baik lokal maupun luar daerah untuk mengetahui persepsi dan kepuasan mereka terhadap upaya revitalisasi yang telah dilakukan, serta pekerjaan lapangan seperti petugas kebersihan (tukang sapu) yang berada di kawasan tersebut sehari-hari.

1.9.3 Sumber data penelitian

Penelitian ini menggabungkan data primer dan data sekunder untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan

revitalisasi Kota Lama. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, seperti BPSKL (Badan Pengelola Kawasan Kota Lama), pelaku usaha pariwisata, dan pengunjung. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti, kebijakan pemerintah, artikel jurnal, dan data statistik pariwisata.

1.9.4 Teknik Pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses revitalisasi Kota Lama Semarang. Informan utama terdiri dari BPSKL (Badan Pengelola Kawasan Kota Lama), pelaku usaha wisata di sekitar kawasan, pengunjung Kota Lama, tenaga kebersihan (petugas sapu atau petugas lapangan), serta pihak dinas terkait yang memiliki program kebersihan dan pengelolaan kawasan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan format semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali informasi yang lebih luas dan fleksibel sesuai konteks. Wawancara dirancang untuk mengetahui persepsi, pengalaman, dan motivasi para pihak, serta untuk memahami implementasi kebijakan revitalisasi dari perspektif yang berbeda.

Untuk BPSKL, wawancara difokuskan pada arah kebijakan, strategi revitalisasi, proses koordinasi dengan berbagai pihak, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program yang sudah berjalan. Pada pelaku usaha atau

UMKM pariwisata, wawancara diarahkan untuk menggali sejauh mana program revitalisasi berdampak pada perkembangan usaha mereka, baik dari sisi peluang ekonomi, perubahan lingkungan usaha, maupun tantangan yang mereka hadapi. Pengunjung Kota Lama diwawancara untuk mengetahui pengalaman kunjungan, persepsi mereka terhadap perubahan kawasan pasca revitalisasi, tingkat kepuasan terhadap fasilitas yang ada, serta minat mereka untuk berkunjung kembali di masa depan.

Sementara itu, wawancara dengan tenaga kebersihan difokuskan pada sejauh mana mereka menjalankan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan, dukungan yang diberikan oleh dinas terkait, serta apakah pengelolaan kebersihan kawasan sudah mengacu pada prinsip sustainable tourism. Untuk pihak dinas, wawancara diarahkan pada program yang telah dilaksanakan, bagaimana program tersebut berkontribusi dalam mendukung revitalisasi, serta strategi yang digunakan dalam pemenuhan standar keberlanjutan pariwisata. Jumlah informan yang diwawancara ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan memperhatikan keterwakilan tiap kategori subjek penelitian. Rencana wawancara dilaksanakan selama periode penelitian di Kota Lama Semarang, dengan penjadwalan menyesuaikan ketersediaan informan.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari berbagai dokumen resmi, laporan, artikel, serta bahan

tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan pengumpulan, seleksi, dan analisis data yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut guna memperoleh informasi yang valid dan mendukung kajian yang dilakukan. Dokumen yang dikaji dapat berupa laporan hasil penelitian sebelumnya, kebijakan pemerintah, artikel ilmiah, atau dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memperoleh data sekunder yang akurat, sistematis, dan terstruktur untuk memperkuat argumen atau menemukan pola yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Observasi

Melalui observasi langsung di lokasi, peneliti dapat mengamati secara detail kondisi fisik bangunan Kota Lama, termasuk struktur arsitektur, tata letak, dan elemen-elemen visual yang menjadi ciri khasnya. Selain itu, peneliti juga dapat mencermati aktivitas pengunjung, seperti pola kunjungan, jumlah wisatawan, perilaku selama berada di area tersebut, dan jenis kegiatan yang dilakukan, baik yang bersifat individu maupun kelompok. Observasi ini juga memberikan kesempatan untuk mempelajari interaksi antara berbagai pihak, seperti pengelola situs, pemandu wisata, pedagang lokal, hingga pengunjung. Dengan melakukan observasi secara langsung, peneliti tidak hanya mendapatkan gambaran nyata tentang situasi di lapangan tetapi juga memahami dinamika sosial dan budaya yang terjadi di lokasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap data

secara empiris dan mendukung analisis yang lebih menyeluruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan Kota Lama.

1.9.5 Teknik analisis data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis tematik, yang bertujuan untuk menggali makna mendalam dari data yang diperoleh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Model ini dipilih karena dapat menggambarkan proses analisis data kualitatif secara sistematis dan mendalam, mulai dari tahap pengumpulan data awal hingga kesimpulan akhir. tahapan-tahapan dari analisis data, diantaranya :

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses konseptualisasi terhadap informasi yang diperoleh. Setiap data baru yang diperoleh akan dibandingkan, diklasifikasikan, dan diintegrasikan dengan data sebelumnya sehingga struktur temuan semakin terarah dan sistematis.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses menyusun sekumpulan informasi terorganisasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan

Tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan secara tematik sesuai fokus penelitian. Data yang telah direduksi disusun berdasarkan kategori dan subkategori analisis, kemudian ditampilkan dalam bentuk narasi analitis yang diperkuat dengan kutipan langsung dari informan sebagai bukti empirik.

c. Penarikan Kesimpulan

Verifikasi dilakukan dengan cara meninjau kembali catatan lapangan, membandingkan antar sumber data (triangulasi), melakukan pengecekan ulang kepada informan, serta memastikan konsistensi antar kategori yang telah dibangun. Proses ini bertujuan menjaga kredibilitas dan validitas temuan penelitian. Hasil analisis diinterpretasikan untuk melihat tingkat ketercapaian indikator pada masing-masing aspek penelitian. Apabila sebagian besar indikator implementasi kebijakan terpenuhi dan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan, maka kebijakan tersebut diinterpretasikan sebagai optimal. Sebaliknya, apabila masih terdapat indikator yang belum terpenuhi secara maksimal, maka diinterpretasikan sebagai belum optimal. Sementara itu, dalam konteks pariwisata berkelanjutan, apabila hasil implementasi kebijakan mampu mendukung aspek lingkungan, ekonomi, sosial budaya, serta pengelolaan destinasi secara seimbang, maka kondisi tersebut diinterpretasikan sebagai berkelanjutan. Namun apabila masih terdapat aspek keberlanjutan yang belum terpenuhi secara memadai, maka kondisi tersebut diinterpretasikan sebagai belum sepenuhnya berkelanjutan.

1.9.6 Kualitas Data

penelitian ini menggunakan kerangka uji keabsahan data yang dikembangkan oleh Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, yang meliputi empat kriteria utama, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Pendekatan ini dipilih karena selaras dengan paradigma penelitian kualitatif yang menekankan makna, konteks, dan konstruksi sosial, bukan generalisasi statistik.

a. Kredibilitas (*credibility*)

Kredibilitas merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian.

Untuk menjamin kredibilitas, penelitian ini menerapkan beberapa tahapan, yaitu triangulasi dan member check.

b. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau dialihkan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Pada penelitian ini, peneliti menyediakan deskripsi yang tebal (*thick description*) mengenai konteks penelitian, karakteristik informan, serta dinamika sosial yang terjadi. Deskripsi yang rinci memungkinkan pembaca menilai sendiri apakah temuan penelitian relevan untuk diterapkan pada situasi lain.

c. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas merujuk pada konsistensi dan keterlacakan proses penelitian. Untuk menjamin dependabilitas, peneliti menyusun

dokumentasi penelitian secara lengkap, meliputi catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen pendukung.

d. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas berkaitan dengan objektivitas temuan, yaitu sejauh mana hasil penelitian benar-benar didasarkan pada data, bukan pada bias, preferensi, atau asumsi pribadi peneliti. Penelitian ini menjaga konfirmabilitas dengan cara menyajikan kutipan langsung dari informan sebagai bukti empiris, membedakan secara tegas antara data dan interpretasi, dan Melakukan refleksi diri (*reflexivity*) terhadap posisi dan potensi bias peneliti.